

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A.Z., 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Alisyahdi, Didik Farkhan, 2015, *55 Rekor Korps Adhyaksa*, Tata Kata Warna, Jakarta.
- Amir, Chaerul, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Pro Deleader, Jakarta.
- Amirudin, *et al*, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, *et al*, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ashidique, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Garner, Bryan A., 1990, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, West Group, USA.

- Gunawan, Ilham, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *et.al*, 2014, *Pre-Trial Justice and Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cetakan ke-1, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kartanegara, Satochid, 1890, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kashim, Ifdal, 2002, *Prinsip-prinsip Van Boven Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, hlm. xxiii
- Kiltgaard, Robert, *et.al*, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muladi, *et al*, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, *et.al*, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Edisi ke-3, Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

- Petrus, *et.al*, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, *et.al*, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Lili, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Reksodipuro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ruba'i, Masruchin, 1994, *Hukum Pidana I*, IKIP Malang, Malang.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *et.al*, 1983, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- _____, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerodibroto, Soenarto, 2004, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Smith, Rhona K.M., *et.al*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Surachman, R.M., *et.al*, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara : Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Tim Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tirtaatmidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Tresna, R., 1978, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 446).

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/11/2011 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor POL. : 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-255/E/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.

Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor : B-128/E/3/1995 tentang Tanggung Jawab Jaksa Selaku Eksekutor Pengadilan.

Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors

Declaration on Minimum Standards Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

Adhyaksa, Faisal, 2011, "Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Surakarta)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses tanggal 02 Juni 2016.

Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pengertian Eksekusi", www.badanbahasa.kemendikbud.go.id/kbbi/index.php/eksekusi, diakses tanggal 17 Desember 2015.

Carikabar, "Lembaga Hukum Amerika Meneliti Keamanan Persidangan Indonesia", www.carikabar.com/hukum/176-lembaga-hukum/843-amerika-meneliti-keamanan-persidangan-Indonesia diakses tanggal 06 Januari 2016

Choky R. Ramadhan, 2016, "Penelitian Anggaran Perkara Pidana Umum Kejaksaan", MaPPI FHUI, Jakarta.

Fahrudin, Ahmad, 2014, "Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Hadi, Ilman, 2012, "Arti Bagian Mengingat Dalam Peraturan Perundang-Undangan", www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fdb23f4a0d9/arti_bagian_mengingat_dalam_peraturan_perundang_undangan, diakses tanggal 25 April 2016

Herlambang, Perdana Wiratraman R., "Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20, No.1, Januari 2005.

International Association of Prosecutors, 1999, "Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors", www.iap-association.org/getattachment/34e49dfe-d5db-4598-91da-16183bb12418/Standards.English.aspx diakses tanggal 07 Mei 2016

Idtesis.com, "Pengertian Bahaya Menurut Para Ahli", www.idtesis.com/pengertian-bahaya-menurut-para-ahli/, diakses tanggal 4 Januari 2016.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, “Arti Kata Aman”, www.kbbi.web.id/aman, diakses tanggal 4 Januari 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), “Subordinasi”, www.kbbi.web.id/subordinasi diakses tanggal 10 Mei 2016.
- Kamea, Henny C., “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, April-Juni 2013.
- Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia”, *Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, Desember 2013.
- Meilala, Nefa Claudia, “Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, www.download.portalgaruda.org/article.php?article=342507&val=7957&title=PENDEKATAN%20KEADILAN%20RESTORATIF:%20UPAYA%20MELIBATKAN%20PARTISIPASI%20KORBAN%20DAN%20DAN%20PELAKU%20SECARA%20SECARA%20LANGSUNG%20DALAM%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20PIDANA, diakses tanggal 27 April 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, “Sistem Peradilan di Indonesia”, www.sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html, diakses tanggal 03 Juni 2016.
- Nisa, Risak, “Definisi HAM Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)”, www.academia.edu/9253288/Definisi_HAM_Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights, diakses tanggal 22 September 2015
- Nov, 2012, “Dilema Kejaksaan Mengeksekusi dengan Petikan Putusan”, www.hukumonline.com/berita/baca/lt46fd15e57e3c2/dilema-kejaksaan-mengeksekusi-dengan-petikan-putusan diakses tanggal 11 Mei 2016.
- Paulina, 2011, “Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Persatuan Jaksa Indonesia, “Home PJI”, www.persatuan-jaksa-indonesia.org diakses tanggal 07 Mei 2016.
- Sabhani, Agus, 2012, “Petikan Putusan Bisa Dijadikan Dasar Eksekusi”, www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f70561432286/petikan-putusan-bisa-dijadikan-dasar-eksekusi diakses tanggal 11 Mei 2016.



Saherodji, 1973, “Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Administrasi Peradilan Indonesia”, *Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana, “Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20, No. 1, Januari 2005.